

**PEDOMAN Pengerjaan Jawaban Pemerintah
Terhadap Pemandangan Umum DPR RI
Tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2020**

Agustus 2019

I. UMUM

A. Pemandangan Umum (pertanyaan) dan pedoman pengerjaannya dapat diunduh melalui situs www.anggaran.kemenkeu.go.id. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon (021) 3505663 atau (021) 3451014 dan alamat email : penyusunan.apbn@kemenkeu.go.id dan penyusunan.apbn@gmail.com.

B. Judul **Kode** adalah **Kode Masalah** :

- Kode masalah : **19** (Masalah Pajak Penghasilan)
diketik bold, misalnya : **Kode : 19**
sedangkan kata **Pertanyaan** diikuti dengan :
- Nama Fraksi : **FPDIP, FPG, FGerindra, FPD, FPAN, FPKB, FPKS, FPPP, FNasdem, dan FHanura**
- Nomor urut pertanyaan : **II.1.a**
- Nomor halaman : **hal.5**
diketik **bold**, misalnya :

Pertanyaan

CONTOH : (di lembar pertanyaan)

Kode : 19

Pertanyaan : FPPP/II.1.a/hal.5

(*pertanyaan/permasalahan/tanggapan, digunting dan ditempel disini*)

Jawaban : (DJP, DJPb, Bappenas)

C. Pertanyaan/Permasalahan/Tanggapan tertulis dari tiap Fraksi tidak perlu diketik ulang, cukup **digunting/ditempel (dikliping)** dengan lengkap dan rapi. Dalam lembar **Jawaban**, Pertanyaan/Permasalahan/Tanggapan diusahakan singkat, bila perlu dilengkapi latar belakang pertanyaan. **Lembar Pertanyaan** dan **Lembar Jawaban** masing-masing **terpisah** dan diberi **Kode**, untuk memudahkan penggabungan mengingat di dalam buku jawaban tidak dicantumkan pertanyaan tetapi langsung **jawaban**.

D. Judul jawaban diketik bold, dengan **Kode Masalah**. Begitu pula **jawaban** atau **jawaban alternatif** diikuti dengan instansi yang menjawab. Namun demikian, mengingat waktu penyelesaian jawaban ini sangat singkat, maka diupayakan agar jawaban dari beberapa instansi dapat digabung (diedit) saling melengkapi oleh penanggung jawab, sehingga tidak ada lagi jawaban alternatif.

CONTOH : (di lembar jawaban)

Kode : 19

Pertanyaan : FPPP/II.1.a/hal.5

Jawaban : (DJP)

Jawaban : (Bappenas) – Alternatif

Jawaban : (DJA, Bappenas, BKF) – Contoh jawaban gabungan

E. Dalam menyiapkan jawaban Pemerintah untuk pemandangan umum DPR-RI nama fraksi ditulis lengkap (**bold**), yaitu:

1. **FPDIP** - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. **FPG** - Fraksi Partai Golongan Karya
3. **FGerindra** - Fraksi Partai Gerindra
4. **FPD** - Fraksi Partai Demokrat
5. **FPAN** - Fraksi Partai Amanat Nasional
6. **FPKB** - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7. **FPKS** - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
8. **FPPP** - Fraksi Partai Persatuan pembangunan
9. **FNasdem** - Fraksi Partai NasDem
10. **FHanura** - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

Apabila suatu pertanyaan disampaikan oleh sepuluh fraksi sekaligus, maka urutan menjawab (*kalaupun tidak ada perubahan urutan*) adalah **FPDIP, FPG, FGerindra, FPD, FPAN, FPKB, FPKS, FPPP, FNasdem, dan FHanura**.

Contoh :

Menjawab pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat**, dan (**lain-lain Fraksi**) mengenai kiranya dapat dijelaskan bahwa

II. KODE MASALAH

1. Dasar hukum Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
2. Peran Strategis kebijakan Fiskal
3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro secara Umum
4. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
5. Sistematika Penulisan Nota keuangan dan RAPBN 2020
6. Perkembangan terkini perekonomian Indonesia
7. Prospek Perekonomian Tahun 2020
8. Pertumbuhan Ekonomi
9. Nilai Tukar Rupiah
10. Inflasi
11. Suku Bunga SPN 3 Bulan
12. Harga Minyak Mentah ICP dan Gas
13. *Lifting* Minyak Mentah
14. *Lifting* Gas
15. Neraca pembayaran Indonesia
16. Pendapatan Negara

17. Penerimaan Dalam Negeri
18. Masalah makro yang berkaitan dengan Penerimaan Perpajakan
19. Pajak Penghasilan (PPH)
20. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
21. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
23. Cukai
24. Pajak Lainnya
25. Pajak Perdagangan Internasional
26. Bea masuk
27. Pajak/pungutan Ekspor
28. Masalah makro yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
29. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas
30. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) NonMigas
31. Penerimaan Pertambangan Umum
32. Penerimaan Kehutanan
33. Penerimaan Perikanan
34. Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
36. Perkembangan Hibah
37. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja Negara
38. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja Pemerintah Pusat
39. Prioritas Nasional dan RKP
40. Anggaran Pendidikan
41. Anggaran Kesehatan
42. Anggaran Kemiskinan/Perlindungan Sosial
43. Anggaran Infrastruktur dan Belanja Modal
44. Pertahanan dan Keamanan
45. Pertanian dan Ketahanan Pangan
46. Lingkungan Hidup dan Energi
47. Jaminan Sosial dan Pensiun
48. Belanja Pemerintah Pusat (termasuk Belanja K/L dan non K/L)
49. Belanja Pegawai dan Pelayanan Umum
50. Pembayaran Bunga Utang
51. Subsidi Energi
52. Subsidi Non Energi
53. Belanja Hibah
54. Belanja Lain-lain
55. Menurut Organisasi
56. Menurut Fungsi
57. Dana Abadi, Pariwisata, dan Penelitian
58. Efisiensi Belanja Barang
59. Masalah makro yang berkaitan dengan Belanja untuk Daerah
60. Dana Bagi Hasil
61. Dana Alokasi Umum
62. Dana Transfer Khusus

63. Dana Otonomi Khusus
64. Dana Insentif Daerah
65. Dana Desa
66. Dana Keistimewaan DIY
67. Keseimbangan Umum dan Defisit Anggaran
68. Masalah makro yang berkaitan dengan Pembiayaan Anggaran
69. Pembiayaan Utang
70. Saldo Anggaran Lebih
71. Privatisasi
72. Hasil Pengelolaan Aset
73. Surat Berharga Negara
74. Pembiayaan Investasi
75. Kewajiban Penjaminan
76. Pinjaman Dalam Negeri
77. Pinjaman Luar Negeri
78. Pinjaman Tunai
79. Pinjaman Kegiatan
80. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
81. Pemberian Pinjaman
82. Lain-lain